

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN JENEPONTO
2019



INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN JENEPONTO
2019



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

**KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2019**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019

Katalog BPS : 4102004.7304
No. Publikasi : 73040.2021
Ukuran Buku : 25,7 cm x 18,2 cm
Jumlah Halaman : xii + 53 halaman

Naskah/Grafik:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Mukrabin, SE, MM.

Penyunting:

ST. Syamriani S., S.Kom.

Penulis:

Novi Fahdilla, S. Tr. Stat.

Pengolah Data:

Novi Fahdilla, S. Tr. Stat.

Gambar Kulit:

Novi Fahdilla, S. Tr. Stat.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka ikut menyebarluaskan hasil pembangunan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Jeneponto, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto menerbitkan publikasi "**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019**". Dalam publikasi ini dijabarkan mengenai perkembangan berbagai aspek yang dapat diukur seperti keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya.

Keberadaan publikasi ini merupakan indikator dan sumber informasi statistik yang dapat dipergunakan dalam berbagai keperluan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Perencanaan yang mantap dan terarah sesuai dengan sasaran pembangunan yang akan dicapai, hanya akan dapat diperoleh apabila ditunjang tersedianya data statistik yang akurat, wajar, obyektif, dan tepat waktu.

Publikasi ini disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik yang disertai analisis deskriptif sehingga pemakai data dapat memahami dengan mudah kondisi dan perkembangan yang dicapai sampai dengan tahun 2019. Semoga dengan kehadiran buku ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Jeneponto, November 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Jeneponto,



Mukrabin, S.E., M.M.

NIP: 19630626 199203 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Sumber Data	2
1.5. Sistematika Penulisan	2
1.6. Metodologi	3
1.7. Konsep/Definisi	3
BAB II. KEPENDUDUKAN	6
2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	7
2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	8
2.3. Angka Beban Ketergantungan	10
2.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama	13
2.5. Penggunaan Alat/Cara KB	14
BAB III. KESEHATAN DAN GIZI	16
3.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	16
3.2. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	18
BAB IV. PENDIDIKAN	21
4.1. Angka Melek Huruf (AMH)	22
4.2. Rata-Rata Lama Sekolah	24
4.3. Tingkat Pendidikan	25
4.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)	26
4.5. Kualitas Pelayanan Pendidikan	28
BAB V. KETENAGAKERJAAN	30

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	30
5.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	32
5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	33
5.4. Jumlah Jam Kerja	35
BAB VI. TARAF DAN POLA KONSUMSI	37
6.1. Pola Konsumsi Penduduk	37
BAB VII. PERUMAHAN DAH LINGKUNGAN	40
7.1. Kualitas Rumah Tinggal	41
7.2. Fasilitas Rumah Tinggal	41
7.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal	43
BAB VIII. KEMISKINAN	45
8.1. Perkembangan Penduduk Miskin	45
8.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan	46
BAB IX. SOSIAL LAINNYA	48
9.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	49
9.2. Akses Kredit Rakyat	50
9.3. Tindak Kejahatan	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Jumlah, Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019	7
2.2. Persebaran Penduduk Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 (%)	9
2.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019	10
2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Jeneponto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	11
2.5. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019 (%)	12
3.1. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Rawat Inap Penduduk di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.....	17
3.2. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.....	18
3.3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	19
4.1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	25
4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 (%)	26
4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Jeneponto Tahun 20189 (%)	27
4.4. Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah, dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Jeneponto Tahun Ajaran 2014/2015-2018/2019	28
5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 (%).....	32

5.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	33
5.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	34
7.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	41
7.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.....	42
7.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.....	43
8.1.	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2019	47
9.1.	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1.	Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Jenepono Tahun 2015-2019	8
2.2.	Piramida Penduduk Kabupaten Jenepono 2019	10
2.3.	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Jenepono Tahun 2019	13
2.4.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Jenepono Tahun 2019	14
3.1.	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Jenepono Tahun 2015-2019	17
4.1.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Jenepono Tahun 2019	23
4.2.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Jenepono Tahun 2015-2019	24
5.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jenepono Tahun 2019 (%)	31
5.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu di Kabupaten Jenepono Tahun 2019	35
6.1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Jenepono Tahun 2018-2019 (Rupiah)	38
6.2.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Jenepono Tahun 2018-2019 (%)	39
8.1.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Jenepono Tahun 2017-2019 (000 jiwa)	49
9.1.	Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Jenepono Tahun 2019	51
9.2.	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Jenepono Tahun 2019	52
9.3.	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kabupaten Jenepono Tahun 2019	53

"...sengaja dikosongkan..."

<https://jenepontokab.sps.go.id>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan Hasil pembangunan secara merata dalam berbagai aspek kehidupan dapat diukur seperti keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang baik tentu diperlukan data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan agar tercapai hasil yang diharapkan.

data kesejahteraan rakyat mutlak diperlukan guna mengetahui sejauh mana hasil-hasil pembangunan telah menyentuh segenap lapisan masyarakat khususnya yang menyangkut berbagai aspek kehidupan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Perlu disadari bahwa untuk menganalisis kesejahteraan rakyat masih banyak terdapat kendala antara lain data-data yang menunjang dan ketersediaan literatur bidang sosial masih kurang. Namun demikian penyusunan indikator ini kiranya dapat menjawab kebutuhan pengguna data secara umum, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto terutama yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ini.

1.2. Ruang Lingkup

Publikasi ini secara umum menjelaskan keadaan kesejahteraan rakyat masyarakat di Kabupaten Jeneponto tahun 2019. Indikator yang disajikan tidak menampilkan indikator kesejahteraan rakyat menurut kecamatan karena kecilnya sampel rumah tangga pada pelaksanaan pendataan. Namun demikian untuk data sekunder ditampilkan menurut kecamatan, selain itu ditampilkan pula data pembandingan dari hasil sensus penduduk dan data pendukung lainnya.

1.3. Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat ini adalah tersedianya data tentang kesejahteraan rakyat yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberi gambaran/informasi mengenai perkembangan demografi, kesejahteraan rumah tangga, sosial budaya, dan sosial ekonomi serta kesejahteraan penduduk secara umum yang merupakan hasil pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Di samping itu, indikator ini

dapat dijadikan acuan bagi penentuan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui indikator yang ada dan target yang ingin dicapai.

1.4. Sumber Data

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 ini menggunakan data dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018. Selain itu digunakan data pendukung lainnya seperti hasil Sensus Penduduk serta data dari instansi terkait.

Susenas sebagai sumber data utama merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara periodik. Survei ini mencakup keterangan tentang aspek-aspek kehidupan penduduk yang sangat luas. Keterangan yang dikumpulkan dari survei ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok **Kor** (Pokok) dan **Modul**. Setiap kelompok dibagi dalam kuesioner tersendiri yaitu kuesioner Kor yang menghimpun pertanyaan inti (tahunan) dan kelompok pertanyaan Modul yang dirangkum dalam kuesioner Modul (tiga tahunan).

1.5. Sistematika Penulisan

Publikasi ini dikelompokkan menjadi sembilan bab. Bab satu sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, ruang lingkup, tujuan, sumber data, sistematika penulisan, metodologi, dan penjelasan mengenai konsep/definisi yang berkenaan dengan Susenas. Bab dua adalah tentang kependudukan, yaitu mengenai jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin; persebaran dan kepadatan penduduk; angka beban ketergantungan; wanita menurut usia perkawinan pertama; serta penggunaan alat/cara KB. Bab tiga adalah kesehatan dan gizi, membahas masalah derajat dan status kesehatan penduduk; tingkat imunitas dan gizi balita; serta pemanfaatan fasilitas tenaga kesehatan. Bab empat membahas kondisi pendidikan yang mencakup Angka Melek Huruf (AMH); rata-rata lama sekolah; tingkat pendidikan; tingkat partisipasi sekolah (APS dan APM); serta kualitas pelayanan pendidikan. Bab lima menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dengan cakupan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan; lapangan usaha dan status pekerjaan; serta jumlah jam kerja.

Bab enam membahas mengenai taraf dan pola konsumsi rumah tangga yang terdiri dari pola konsumsi penduduk dan golongan pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya pada bab tujuh berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, yaitu mencakup kualitas rumah tinggal; fasilitas rumah tinggal; dan status kepemilikan rumah tinggal. Bab delapan membahas tentang kemiskinan dengan cakupan perkembangan penduduk miskin serta garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Bab terakhir yaitu bab sembilan membahas mengenai sosial lainnya yang mencakup perjalanan wisata; akses pada teknologi informasi dan komunikasi; akses pengobatan gratis; serta tindak kejahatan. Keseluruhan indikator diulas dan dilengkapi dengan tabel atau grafik dengan harapan lebih memudahkan pemakai data memahami substansi dalam publikasi ini.

1.6. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini berupa analisis deskriptif dengan sumber data Susenas dan Sakernas 2019. Penyajian data statistik yang mencakup semua aspek kesejahteraan adalah tidak mungkin karena tidak semua aspek kesejahteraan dalam pengertian luas dapat diukur secara statistik.

Secara ideal, Indikator Kesejahteraan Rakyat dapat memberi gambaran mengenai pengaruh atau dampak dari pembangunan atau yang bersifat output. Keterbatasan tersedianya indikator keluaran yang dapat diturunkan dari statistik sosial menyebabkan indikator ini juga menyajikan indikator yang bersifat masukan atau proses dalam artian suatu ukuran yang menggambarkan besarnya upaya-upaya pembangunan, walaupun indikator yang bersifat masukan masih terbatas.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jenepono 2019 meliputi sejumlah indikator yang dirinci ke dalam delapan kelompok indikator, yaitu Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan Hidup, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya. Tujuan dari kedelapan aspek sosial ekonomi dan sosial demografis tersebut masing-masing mempunyai fenomena tersendiri dalam perspektif waktu maupun tempat dan saling berinteraksi satu sama lain.

1.7. Konsep/Definisi

Kepadatan penduduk yaitu banyaknya penduduk dibagi luas wilayah.

Rasio jenis kelamin yaitu perbandingan laki-laki dan perempuan dikali 100.

Angka beban ketergantungan yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 tahun sampai 64 tahun) dikali 100.

Peserta KB yaitu perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dan memakai/menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi.

Metode kontrasepsi adalah alat/cara pencegahan kehamilan.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain.

Rawat jalan yaitu upaya penderita untuk mengatasi keluhan kesehatannya dengan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan modern/tradisional tanpa menginap.

Angka Melek Huruf (AMH) yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

Penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Angkatan kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah jumlah angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ instansi tempat seseorang bekerja.

2. KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah sebagai sasaran pembangunan dan merupakan sumber daya dari pembangunan, sehingga menjadi sangat penting adanya integrasi penduduk dalam pembangunan yaitu pembangunan yang berwawasan kependudukan. Jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam penanganan masalah kependudukan pemerintah tidak saja hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Besarnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraannya justru merupakan kendala bagi pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk pengembangan sosial kependudukan tidak bisa dirumuskan tanpa adanya data statistik mengenai kependudukan. Informasi tersebut penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan. Keterangan atau informasi tentang penduduk, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Juga dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun.

Selain itu, dalam pembangunan berwawasan gender, penting juga mengetahui informasi tentang berapa jumlah penduduk perempuan terutama yang termasuk dalam kelompok usia reproduksi (usia 15-49 tahun), partisipasi penduduk perempuan menurut umur dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Lebih dari itu, pentingnya data kependudukan ditekankan karena perubahan yang cepat di dalam populasi yang memberi pengaruh di dalam kehidupan. Kebijakan seperti itu dapat dirancang dan diterapkan dengan baik hanya atas dasar data statistik yang akurat dan lengkap. Untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, maka diperlukan berbagai indikator kependudukan sehingga arah dari kebijakan yang dibuat akan tepat sasarannya.

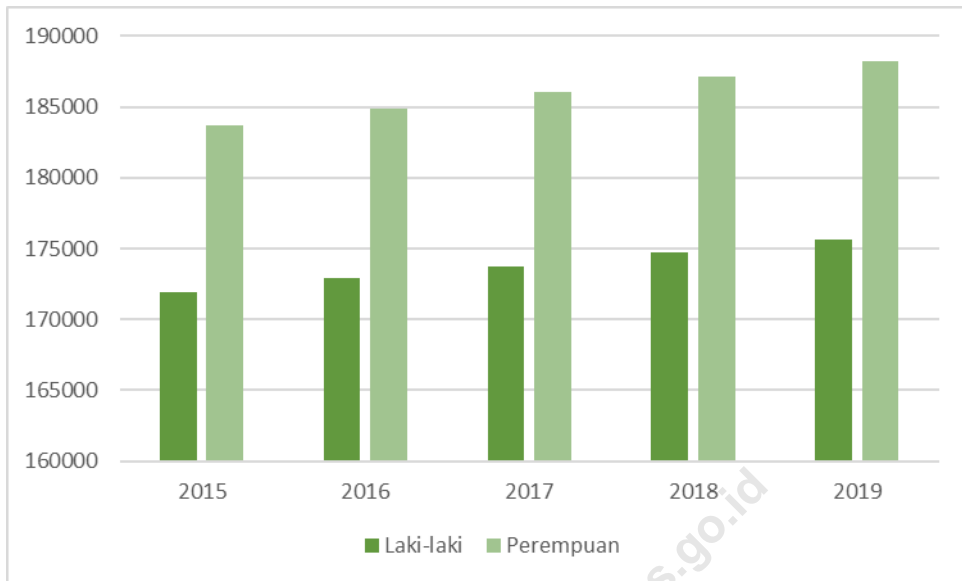
2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk selalu bertambah dari tahun ke tahun. Selama periode 2015-2019, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen. Tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk adalah sekitar 0,50 persen atau bertambah 1.999 jiwa dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 sebanyak 363.792 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu perempuan 188.185 jiwa dan laki-laki 175.607 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Jeneponto adalah 93. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Tabel 2.1. Jumlah, Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk	355,599	357,807	359,787	361,793	363.792
a. Laki-laki	171,882	172,894	173,771	174,682	175.607
b. Perempuan	183,717	184,913	186,016	187,111	188.185
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,65	0,62	0,55	0,56	0,50
Sex Ratio	94	94	93	93	93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jeneponto 2019

2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin. Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah.

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto, penduduk paling banyak tinggal di Kecamatan Binamu. Kecamatan tersebut merupakan ibukota kabupaten sehingga jumlah penduduknya lebih besar dari kecamatan yang lain, mengingat bahwa kecamatan tersebut sebagai sentral pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2015-2019, persentase penduduk yang tinggal di Kecamatan Binamu semakin meningkat. Dari total penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, terdapat sekitar 15,67 persen tinggal di Kecamatan Binamu, dengan kepadatan penduduk 821 orang per km². Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Arungkeke yaitu

sekitar 5,10 persen dari total penduduk Kabupaten Jeneponto, dengan kepadatan penduduk sebesar 620 orang per km². Kecamatan Bangkala Barat memiliki kepadatan paling kecil yaitu 190 orang per km², distribusi jumlah penduduk yaitu 7,98 persen dengan wilayahnya sebagian besar pegunungan dan hutan, luasnya mencapai 152,96 km² atau sekitar 20,4 persen dari luas Kabupaten Jeneponto.

Kecamatan Bangkala Barat perlu menjadi fokus perhatian pemerintah daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Artinya, kecamatan tersebut adalah kecamatan yang paling tidak diminati penduduk untuk bertempat tinggal. Alasan utama adalah karena kondisi geografis yang sebagian besar berupa pegunungan dan hutan, alasan yang kedua adalah karena kurangnya sumber kegiatan ekonomi. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan terobosan- terobosan untuk mengangkat daya saing dua kecamatan tersebut dengan memperbaiki sarana dan prasarana terutama jalan-jalan, penerangan, dan membuka sumber-sumber kegiatan ekonomi baik bersifat perdagangan maupun pertanian.

Tabel 2.2. Persebaran Penduduk Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 (%)

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangkala	14,85	14,91	14,98	15,04	15,11
2	Bangkala Barat	7,84	7,88	7,91	7,95	7,98
3	Tamalatea	11,66	11,64	11,62	11,60	11,58
4	Bontoramba	10,10	10,09	10,07	10,06	10,04
5	Binamu	15,49	15,54	15,58	15,63	15,67
6	Turatea	8,84	8,87	8,89	8,92	8,95
7	Batang	5,47	5,44	5,42	5,39	5,37
8	Arungkeke	5,19	5,17	5,15	5,12	5,10
9	Tarowang	6,36	6,33	6,30	6,28	6,25
10	Kelara	7,65	7,61	7,58	7,55	7,51
11	Rumbia	6,55	6,52	6,49	6,46	6,43
Jeneponto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

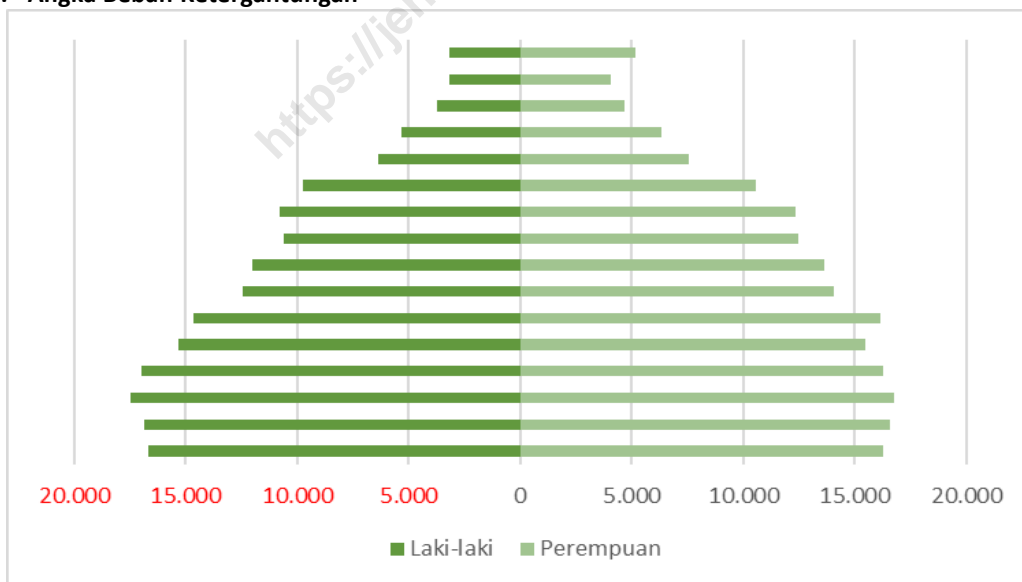
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangkala	121,82	433	438	442	447	451
2	Bangkala Barat	152,96	182	184	186	188	190
3	Tamalatea	57,58	720	723	726	729	732
4	Bontoramba	88,30	407	409	410	412	414
5	Binamu	69,49	793	800	807	814	821
6	Turatea	53,76	585	590	595	600	605
7	Batang	33,04	588	589	590	591	591
8	Arungkeke	29,91	617	618	619	620	620
9	Tarowang	40,68	556	557	558	558	559
10	Kelara	43,95	619	620	620	621	622
11	Rumbia	58,30	399	400	400	401	401
Jeneponto		749,79	468	471	474	477	483

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

2.3. Angka Beban Ketergantungan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Jeneponto 2019

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Jeneponto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase	
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	16.682	16.273	32.955	9,50	8,65
5-9	16.848	16.590	33.438	9,59	8,82
10-14	17.509	16.750	34.259	9,97	8,90
15-19	16.998	16.284	33.282	9,68	8,65
20-24	15.349	15.488	30.837	8,74	8,23
25-29	14.679	16.170	30.849	8,36	8,59
30-34	12.467	14.034	26.501	7,10	7,46
35-39	12.051	13.605	25.656	6,86	7,23
40-44	10.634	12.455	23.089	6,06	6,62
45-49	10.801	12.341	23.142	6,15	6,56
50-54	9.765	10.548	20.313	5,56	5,61
55-59	6.387	7.534	13.921	3,64	4,00
60-64	5.357	6.316	11.673	3,05	3,36
65-69	3.717	4.640	8.357	2,12	2,47
70-74	3.157	4.028	7.185	1,80	2,14
75+	3.206	5.129	8.335	1,83	2,73
Jumlah	175.607	188.185	363.792	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Tabel 2.4 menunjukkan distribusi penduduk semakin menurun jumlahnya untuk jenjang kelompok umur yang lebih tinggi. Apabila dilihat dari piramida penduduk tahun 2019, menggambarkan piramida penduduk muda (*expansive*). Hal ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Jeneponto terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah, sehingga menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Jeneponto menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2015-2019. Secara rata-rata dapat dinyatakan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jeneponto menurun sebesar 2,36 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Semakin rendah rasio ketergantungan, berarti semakin kecil beban yang ditanggung kelompok usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Angka beban ketergantungan pada tahun 2019 adalah sebesar 52,05. Artinya, setiap 100 penduduk produktif menanggung 52 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda yang banyak akan menanggung beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari pendidikan sampai penyiapan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.

Tabel 2.5. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019 (%)

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-14	28,68	28,40	28,13	27,89	27,67
15-64	65,23	65,41	65,56	65,68	65,77
65+	6,09	6,19	6,31	6,43	6,56
Angka Beban Ketergantungan	53,31	52,88	52,53	52,25	52,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

2.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

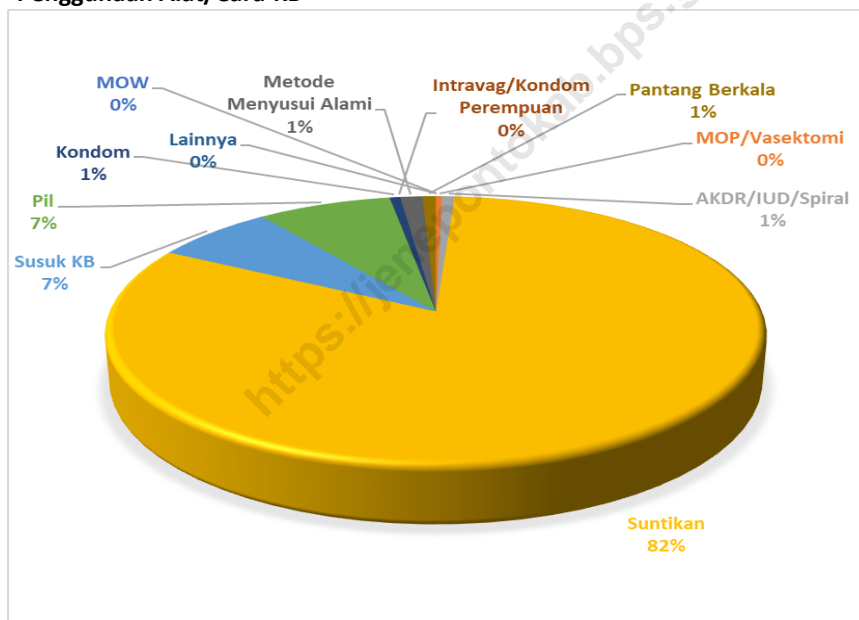


Sumber: Susenas

Gambar 2.3. Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019, sebagian besar wanita di Kabupaten Jeneponto melakukan perkawinan pertamanya pada usia 21 tahun ke atas yaitu sebanyak 43,04 persen. Sementara itu, wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 19-20 tahun ada sebanyak 18,19 persen, sedangkan usia 17-18 tahun sebanyak 25,15 persen. Persentase wanita berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya adalah yang terendah, yakni sebesar 13,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama sudah cukup baik. Namun masih adanya perkawinan pada usia dini ini kemungkinan disebabkan oleh anak putus sekolah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, menjamurnya pergaulan bebas di masyarakat, serta masih adanya pandangan masyarakat untuk menikahkan anaknya di usia muda.

2.5. Penggunaan Alat/Cara KB



Sumber: Susenas

Gambar 2.4. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu

Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Susenas 2019, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB di Kabupaten Jeneponto ada sekitar 58,74 persen. Dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan adalah yang paling banyak diminati, yaitu sekitar 82 persen. Kemudian susuk KB sebesar 7 persen dan pil sebesar 7 persen. Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah AKDR/IUD/Spiral, pantang berkala, dan MOW masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen. Tingginya persentase penggunaan alat kontrasepsi suntikan KB disebabkan karena alat ini relatif praktis, mudah pemakaiannya (tidak membuat akseptor malu/risih pada saat pemasangan seperti misalnya IUD) dan efek sampingnya tidak terlalu besar. Alat/cara ini dianggap relatif lebih aman, murah, dan mudah didapatkan bagi kebanyakan wanita.

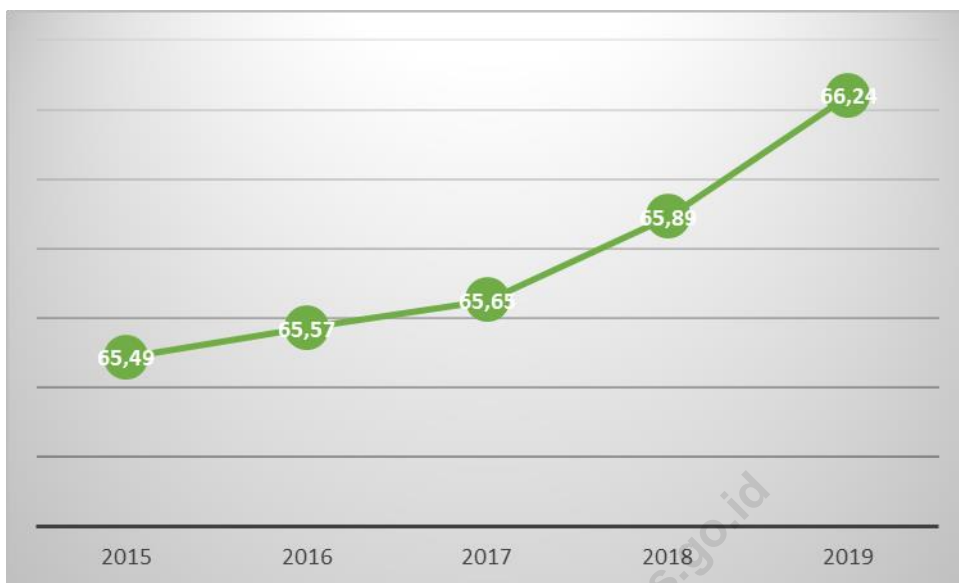
3. KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, terjangkau, dan merata. Tersedianya sarana kesehatan seperti Puskesmas/Pustu lengkap dengan tenaga medis dan peralatan yang memadai merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya derajat kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat/ penduduk diukur dari beberapa indikator kesehatan, antara lain angka kesakitan, angka kematian, serta angka harapan hidup sejak dilahirkan.

3.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jeneponto ditandai dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). Selama periode 2015-2019 telah terjadi peningkatan AHH masyarakat dari 65,49 pada tahun 2015 menjadi 66,24 di tahun 2019. Meskipun peningkatannya kecil, namun hal ini menandakan bahwa terjadi perpanjangan usia hidup masyarakat Jeneponto. Peningkatan angka harapan hidup ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan peningkatan kesehatan lingkungan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Gambar 3.1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019

Untuk melihat status kesehatan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari indikator angka kesakitan (morbiditas) penduduk. Morbiditas menunjukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 3.1. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Rawat Inap Penduduk di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Keterangan (1)	Jumlah (2)
Angka Kesakitan (%)	15,13
- Laki-laki (%)	14,58
- Perempuan (%)	15,64
Lama Rawat Inap (Hari)	3,07

Sumber: Susenas

Tabel 3.1. menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 mencapai 15,13 persen. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk yang sakit lebih banyak dialami oleh perempuan (15,64 persen) dibandingkan laki-laki (14,58 persen). Rata-rata rawat inap penduduk berada pada kisaran 4 hari.

3.2. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Tabel 3.2. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Penolong Persalinan	Persentase
(1)	(2)
Tenaga Kesehatan	96,86
- Dokter	18,00
- Bidan	78,86
- Lainnya	-
Bukan Tenaga Kesehatan	3,14
- Dukun Beranak	3,14
- Lainnya	-

Sumber: Susenas

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, di mana pada tahun 2019 persentase balita di Kabupaten Jeneponto yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 96,86 persen. Peran bidan sebagai penolong persalinan adalah yang paling besar, yakni mencapai 78,86 persen. Namun di beberapa daerah lain di Kabupaten Jeneponto masih terdapat tenaga penolong persalinan yaitu dukun beranak. Hal ini hendaknya perlu mendapat

perhatian dari pihak berwenang dengan memberikan bimbingan teknis yang lebih sempurna secara medis, utamanya kepada dukun yang belum terlatih, guna mengurangi tingkat kematian bayi yang kadang disebabkan oleh penanganan yang kurang steril pada proses persalinan ibu dan kelahiran bayi.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Tempat Berobat	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit	7,00	8,62	7,88
Praktik Dokter/Bidan	21,46	20,21	20,78
Klinik/Praktek Dokter Bersama	8,64	9,68	9,20
Puskesmas/Pustu	52,58	60,18	61,27
UKBM	1,51	1,14	1,31
Praktek Pengobatan Tradisional	0,64	0,32	0,47
Lainnya	4,93	4,18	4,53
% Penduduk yang Berobat Jalan	53,02	52,96	52,99

Sumber: Susenas

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, keadaan sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Banyaknya penduduk Kabupaten Jeneponto yang berobat jalan pada tahun 2019 mencapai 52,99 persen, di mana penduduk laki-laki yang berobat jalan mencapai 53,02 persen sedangkan penduduk perempuan hanya sekitar 52,96 persen. Perubahan sikap masyarakat yang lebih baik

ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke fasilitas pengobatan modern daripada pengobatan tradisional. Tempat berobat yang paling diminati penduduk Kabupaten Jeneponto adalah Puskesmas/Pustu yang mencapai 61,27 persen, kemudian praktik dokter/bidan 20,78 persen, rumah sakit 7,88 persen, dan sisanya di bawah lima persen. Banyaknya penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah.

<https://jenepontokab.bps.go.id>

4. PENDIDIKAN

Paradigma dan pengalaman menunjukkan bahwa kebodohan dan kemiskinan adalah merupakan musuh terbesar dalam setiap upaya pembangunan suatu bangsa. Keduanya saling terkait bagaikan dua sisi mata uang. Kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan, dan kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan. Dalam kehidupan dunia yang penuh kompetisi, lebih-lebih menghadapi era pasar bebas, kebodohan dan kemiskinan harus secepatnya diberantas, dan oleh karena itu pula dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Selain itu, dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan kemudian dalam ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk mengaktualisasikan amanah UUD 1945 tersebut, maka pemerintah Indonesia mengatur penyelenggaraan pendidikan melalui undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989 yang tidak memadai lagi serta perlu disempurnakan sesuai amanat perubahan UUD 1945. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan UUD dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sisdiknas dimaksudkan sebagai arah dan strategi pembangunan nasional bidang pendidikan.

Kebijakan pemerataan pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan, dan yang dikelola secara efisien. Dengan demikian, program kesempatan belajar akan berhasil jika mutu, relevansi, dan efisiensi ditingkatkan pula pada waktu yang sama. Dalam kaitannya dengan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun, hal ini dilakukan antara lain dalam bentuk pembebasan SPP secara bertahap, penghapusan syarat masuk dari SD ke SLTP, pengembangan kurikulum dan metode belajar, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, serta pengembangan prasarana pendidikan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep '*link and match*', yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan andal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

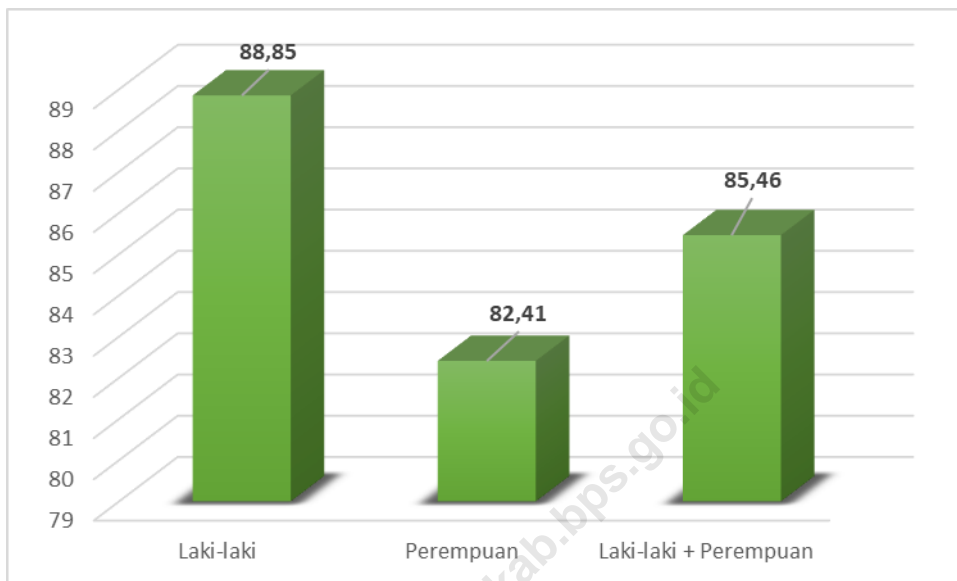
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga.

Dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan mengidentifikasi masalah untuk menetapkan sasaran pembangunan dan kebijakan pembangunan pendidikan dibutuhkan data statistik. Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara umum, biasa diukur melalui perubahan dan perkembangan yang berhasil dicapai masyarakat pada waktu tertentu. Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui monitoring pencapaian pendidikan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru dan Rasio Murid Kelas.

4.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan

semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.



Sumber: Susenas

Gambar 4.1. Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 (%)

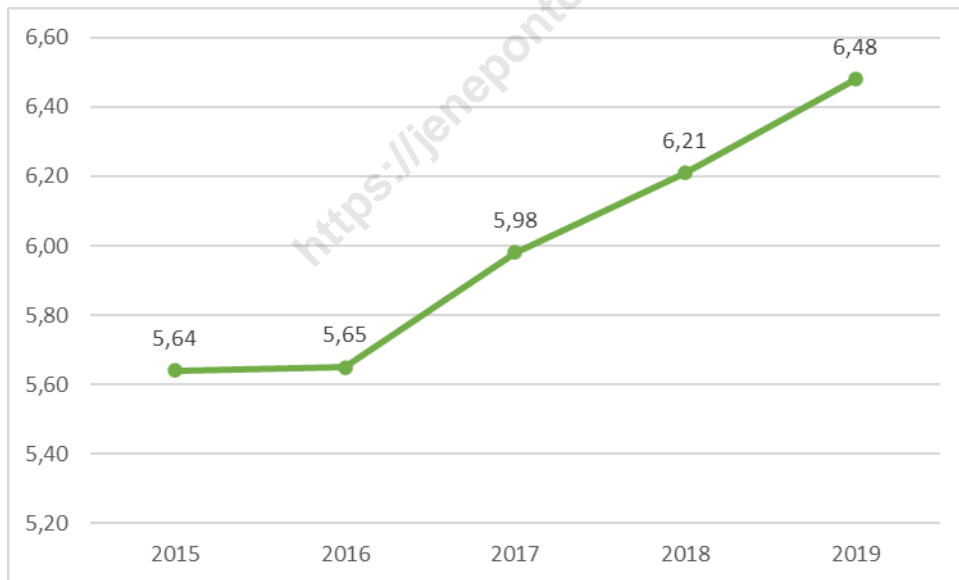
Pada tahun 2018, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kabupaten Jeneponto yang berusia 15 tahun ke atas mencapai 85,46 persen. AMH yang baik mencerminkan angka buta aksara masyarakat semakin menurun dan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan keberhasilan program pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. AMH penduduk laki-laki tercatat sebesar 88,85 persen, sedangkan AMH penduduk perempuan sebesar 82,41 persen. Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara AMH laki-laki dan perempuan ini menunjukkan belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini berkaitan pula dengan beberapa kalangan masyarakat yang masih memprioritaskan anak laki-laki untuk disekolahkan daripada anak perempuannya.

4.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu berkisar antara 5,64 sampai 6,48. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 5 SD atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Angka ini paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya se-Sulawesi Selatan. Pemerintah harus lebih berupaya untuk memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan, sehingga dapat meningkatkan daya saing IPM.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Gambar 4.2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019 (%)

4.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2019, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas ada sebanyak 49,77 persen. Semakin tinggi persentase angka partisipasi anak yang tamat SMP, semakin banyak anak-anak yang mempunyai peluang untuk menikmati pendidikan selanjutnya. Hal ini menggambarkan semakin banyak keluarga yang sadar dan mampu menyekolahkan anaknya sesuai dengan wajib belajar 9 tahun.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Tingkat Pendidikan (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki + Perempuan (4)
Tidak Mempunyai Ijazah	31,30	32,06	31,68
SD/MI	18,12	18,97	18,55
SMP/MTs	19,71	20,86	20,29
SMA/SMK/MA	24,73	17,77	21,25
Diploma I/II	0,22	0,2	0,21
Diploma III/Sarjana Muda	0,15	1,51	0,83
Diploma IV/S1/S2/S3	5,76	8,63	7,20
SMP+	50,57	48,97	49,77

Sumber: Susenas

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, secara umum masih ada 31,68 persen penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat kurang. Diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik daripada penduduk perempuan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan Diploma III ke atas, lebih banyak persentase penduduk perempuan yang menamatkan dibandingkan penduduk laki-laki. Sedangkan untuk jenjang SMA sederajat dan Diploma I, secara umum penduduk laki-laki lebih banyak menamatkan pendidikan dibanding penduduk perempuan.

4.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur di antaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan hasil Susenas 2019, APS penduduk berumur 5-6 tahun adalah sekitar 45,84 persen, 7-12 tahun sekitar 99,56 persen, 13-15 tahun sekitar 87,11 persen, dan 16-18 tahun sekitar 63,67 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan terlihat lebih baik bila dibandingkan penduduk laki-laki. Pada kelompok umur 5-6 tahun, APS didominasi oleh penduduk laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun, APS didominasi oleh penduduk perempuan. Pemerintah harus terus meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah agar lebih merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 (%)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6	47,28	44,43	45,84
7-12	99,17	100	99,56
13-15	84,54	89,47	87,11
16-18	57,09	70,7	63,67

Sumber: Susenas

Sementara itu, APM penduduk berumur 7-12 tahun mencapai 99,05 persen, 13-15 tahun sekitar 64,75 persen, dan 16-18 tahun sekitar 50,85 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM penduduk perempuan terlihat lebih baik bila dibandingkan penduduk laki-laki pada semua kelompok umur.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 (%)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	98,23	100	99,05
13-15	60,77	68,4	64,75
16-18	45,51	56,56	50,85

Sumber: Susenas

Dari gambaran pembahasan APS dan APM di atas masih menunjukkan adanya kesenjangan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh layanan pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, di samping faktor ekonomi, fasilitas layanan pendidikan yang masih belum merata dan sangat terbatas turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat serta memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan.

4.5. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru, rasio guru-sekolah, dan rasio murid-kelas.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajar akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Tabel 4.4. Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah, dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Jeneponto Tahun Ajaran 2014/2015-2018/2019

Tahun	Rasio Murid-Guru/Dosen				Rasio Guru/Dosen-Sekolah				Rasio Murid-Sekolah		
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2014/2015	21	11	8	9	7	15	25	49	153	172	204
2015/2016	15	12	10	13	10	14	25	48	148	171	241
2016/2017	12	10	10	15	12	17	23	43	147	166	222

2017/2018	11	7	10	16	13	24	22	46	147	167	216
2018/2019	13	10	12	29	11	16	19	38	137	169	229

Sumber: Jenepono Dalam Angka, diolah

Rasio murid-guru mengalami perkembangan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, rasio mahasiswa-dosen meningkat yaitu sebesar 16. Tidak demikian halnya dengan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD dan SMP yang mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Semakin rendah rasio murid-guru, menunjukkan bahwa beban seorang guru untuk memberikan pelajaran kepada muridnya semakin berkurang sehingga proses belajar akan lebih efektif.

Rasio guru per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu, sebaliknya makin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, untuk kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Rasio guru-sekolah mengalami perkembangan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, rasio guru-sekolah pada seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Berdasarkan Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi rasio guru per sekolahnya karena terkait dengan jumlah sarana sekolah yang semakin sedikit pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Indikator berikutnya adalah rasio murid per sekolah. Rasio murid per sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid dengan daya tampung sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per sekolah digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah.

Rasio murid-sekolah mengalami perubahan setiap tahun namun perubahannya tidak signifikan. Rasio murid-sekolah SMD pada tahun ajaran 2018/2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 137, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA tidak mengalami perubahan yang signifikan. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan sekolah semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa jumlah siswa yang ada di dalam sekolah tersebut tinggi. Tingginya rasio murid per sekolah juga akan memberikan dampak pada rendahnya efektivitas proses belajar mengajar.

5. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan kemudian selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha agar penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi berkaitan langsung dengan masalah ketenagakerjaan karena mengakibatkan bertambah besarnya proporsi penduduk usia kerja. Banyaknya penduduk usia kerja harus diimbangi dengan adanya kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru yang memadai.

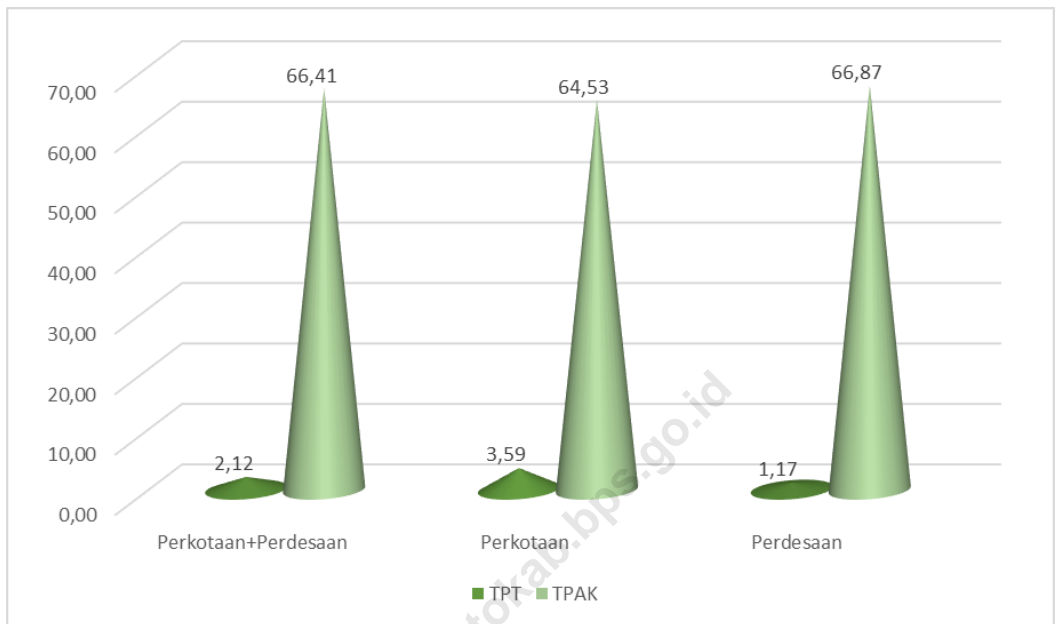
Perluasan kesempatan kerja harus diimbangi pula dengan tingkat produktivitas dan keterampilan. Keterampilan yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berorientasi pada penekanan terjadinya pengangguran terbuka. Oleh karena itu ketenagakerjaan di masa mendatang akan dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Pendidikan dan keterampilan kerja sangat dibutuhkan bagi negara yang sedang membangun karena dengan modal itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas.

Perencanaan pendidikan yang mengacu pada lulusan yang siap pakai semakin dibutuhkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan selanjutnya menuntut tersedianya tenaga kerja yang semakin spesialis dalam bidangnya. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus mengantisipasi jenis pekerjaan yang akan membutuhkan banyak tenaga kerja di masa mendatang.

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang

termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.



Sumber: Sakernas

Gambar 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 (%)

Jumlah angkatan kerja di Jeneponto pada tahun 2019 mencapai 175.204 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 97,88 persen atau sekitar 171.319 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, TPAK di Jeneponto mencapai 66,41 persen, di mana TPAK perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, masing-masing sebesar 66,87 persen dan 64,53 persen. Sementara itu, TPT Jeneponto pada tahun 2019 adalah sebesar 2,12 persen. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, penduduk yang menganggur lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan daripada perdesaan. TPT perkotaan mencapai 3,59 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang hanya sebesar 1,17 persen.

Masih cukup tingginya tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di sektor pertanian, di mana sektor ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas karena tidak perlu mempunyai keahlian

khusus. Tingginya tingkat pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja yang tadinya berada di perdesaan pindah ke wilayah perkotaan.

5.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT penduduk Jeneponto pada tahun 2018 paling besar berasal dari lulusan Diploma I/II/III/Akademi, yaitu mencapai 31,67 persen. Ini menunjukkan bahwa lulusan Diploma I/II/III/Akademi belum/tidak terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus tersebut menyerap tenaga kerja yang pendidikannya lebih tinggi dan lebih berkualitas dibandingkan tingkat Diploma I/II/III/Akademi.

Tabel 5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 (%)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak/ Belum/ Tamat SD	0,59	0,74	0,71
SMP	1,53	0,31	0,54
SMA	0,41	0,61	0,57
SMK	0,00	0,11	0,09
Diploma I/II/III/Akademi	0,00	0,00	0,00
Unversitas	1,07	0,00	0,20
Total	3,59	1,77	2,12

Sumber: Sakernas

Angka TPT untuk penduduk yang berpendidikan sarjana (Universitas) di perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan, masing-masing sebesar 1,07 persen dan 0 persen. Penduduk yang berpendidikan sarjana terserap maksimal di wilayah perdesaan. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil Sakernas 2019, setengah dari penduduk Jeneponto bekerja pada sektor pertanian, yaitu mencapai 57,07 persen. Kemudian disusul oleh sektor jasa 29,93 persen, dan sector manufaktur 13,00 persen.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Kelompok Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	39,05	61,22	57,07
Manufaktur	9,30	13,85	13,00
Jasa	51,64	24,92	29,93

Sumber: Sakernas

Di daerah perdesaan, sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar (61,22 persen) dibandingkan di perkotaan yang hanya sebesar 39,05 persen. Hal ini terkait dengan luasnya areal pertanian yang tersedia di perdesaan, sementara lahan di perkotaan yang relatif lebih sempit sehingga penduduk bekerja lebih banyak di luar sektor pertanian. Sektor jasa yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar di daerah perkotaan menunjukkan bahwa sektor ini menjadi andalan bagi penduduk perkotaan untuk mencari penghasilan.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Status Pekerjaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	16,80	15,33	15,60
Berusaha Dibantu Pekerja Tak Dibayar	19,27	32,82	30,29
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap	6,47	2,54	3,27
Buruh/Karyawan	33,85	15,72	19,11
Pekerja Bebas Pertanian	6,87	4,22	4,72
Pekerja Bebas Non Pertanian	3,22	2,66	2,76
Pekerja Tak Dibayar	13,51	26,71	24,24

Sumber: Sakernas

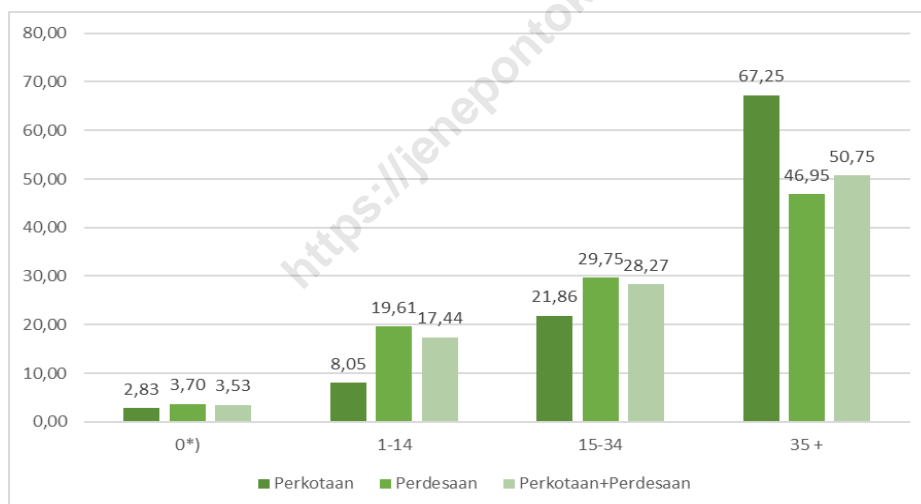
Berdasarkan status pekerjaannya, pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Jeneponto yang berusaha dibantu pekerja tidak tetap/tak dibayar lebih besar dibandingkan status pekerjaan lain, yaitu mencapai 30,29 persen. Demikian halnya dengan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar yang memiliki persentase cukup besar yaitu 24,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang hanya bekerja untuk membantu orang lain, bukan secara mandiri bekerja mencari penghasilan.

Di daerah perkotaan, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan yang mencapai 33,85 persen. Sementara itu di perdesaan, penduduk yang berusaha dibantu pekerja tidak tetap/tak

dibayar menjadi yang terbanyak dengan persentase sebesar 32,82 persen. Penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas non pertanian adalah yang paling sedikit di daerah perkotaan sebesar 3,22 persen sedangkan penduduk yang berstatus berusaha dibantu pekerja tetap adalah yang paling sedikit di daerah pedesaan sebesar 2,54 persen.

5.4. Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran kentara atau terselubung di mana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).



Sumber: Sakernas

*) Sementara tidak bekerja

Gambar 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Secara umum, persentase pekerja di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu yang lalu adalah sebesar 49,25 persen. Di daerah perkotaan, jumlah pekerja yang

bekerja di bawah jam kerja normal adalah 32,75 persen, lebih rendah dibanding perdesaan yang mencapai 53,05 persen. Sementara itu, penduduk yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja dengan jam kerja 0 (nol) jam adalah sebesar 3,53 persen, di mana jumlah di perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 2,83 persen dan 3,70 persen.

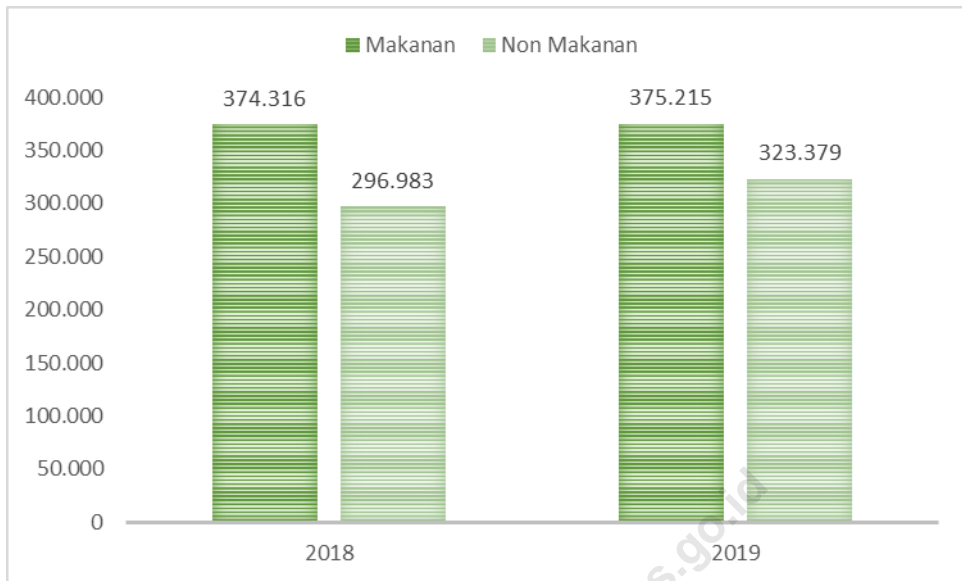
<https://jenepontokab.bps.go.id>

6. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

6.1. Pola Konsumsi Penduduk

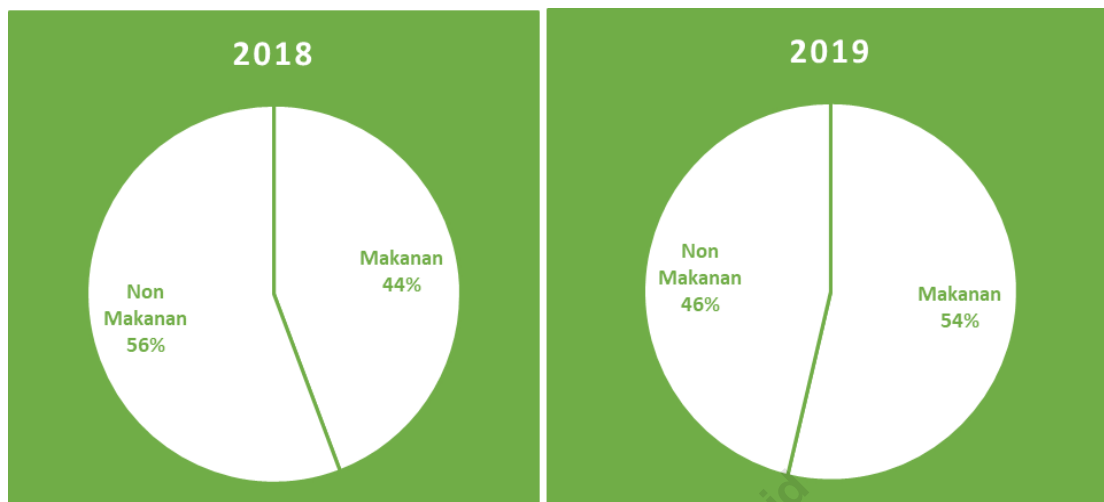
Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Sumber: Susenas

Gambar 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2019 (Rupiah)

Gambar 6.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2018 dan 2019. Terlihat bahwa selama periode tersebut rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Jeneponto meningkat dari Rp 671.299,00 menjadi Rp 698.594,00.



Sumber: Susenas

Gambar 6.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2019 (%)

Bila dilihat dari jenis pengeluarannya, berbeda dengan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita untuk non makanan masih meningkat dibandingkan makanan. Persentase pengeluaran untuk non makanan mengalami penurunan, dari 55,76 persen di tahun 2018 menjadi 46,29 persen di tahun 2019. Sementara itu, pengeluaran makanan mengalami peningkatan, dari 44,24 persen di tahun 2018 menjadi 53,71 persen di tahun 2019. Pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, dan lainnya.

7. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase
(1)	(2)
Lantai bukan tanah	97,40
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes	99,02
Dinding terluas tembok dan kayu	33,10
Luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$	90,61

Sumber: Susenas

Berdasarkan data Susenas 2019, persentase rumah tangga di Kabupaten Jeneponto yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 97,40 persen. Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Rumah tinggal di Jeneponto dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 99,02 persen. Sementara itu, bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu sebesar 33,10 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m^2 . Rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$ di Kabupaten Jeneponto mencapai 90,61 persen.

7.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi

yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2019, rumah tangga di Jeneponto yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak mencapai 37,94 persen. Air bersih merupakan air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 meter. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2019 mencapai 89,67 persen.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Indikator Fasilitas Perumahan	Persentase
(1)	(2)
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	37,94
Air minum bersih	89,67
Jamban sendiri	69,64
Jamban dengan tangki septik	89,35
Sumber penerangan listrik	100

Sumber: Susenas

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban dengan tangki septik.

Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Persentase rumah tangga di Kabupaten Jeneponto yang memiliki jamban sendiri mencapai 69,64 persen. Di samping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan

jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2019, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik mencapai 89,35 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas 2019, 100 persen rumah tangga di Kabupaten Jeneponto telah menikmati fasilitas penerangan listrik. Memadainya alat penerangan yang digunakan masyarakat telah memberikan dampak positif bagi pembangunan, khususnya di perdesaan seperti meningkatnya minat baca, bertambahnya media massa seperti televisi dan radio, serta meningkatnya kegiatan ekonomi rumah tangga.

7.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Persentase
(1)	(2)
Milik Sendiri	91,65
Kontrak/Sewa	0,75
Bebas Sewa	6,55
Dinas/ Lainnya	1,05

Sumber: Susenas

Berdasarkan hasil Susenas 2019, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 91,65 persen, sisanya 8,35 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 0,75 persen kontrak/sewa, bebas sewa 6,55 persen, dan rumah dinas/lainnya 1,05 persen.

<https://jenepontokab.bps.go.id>

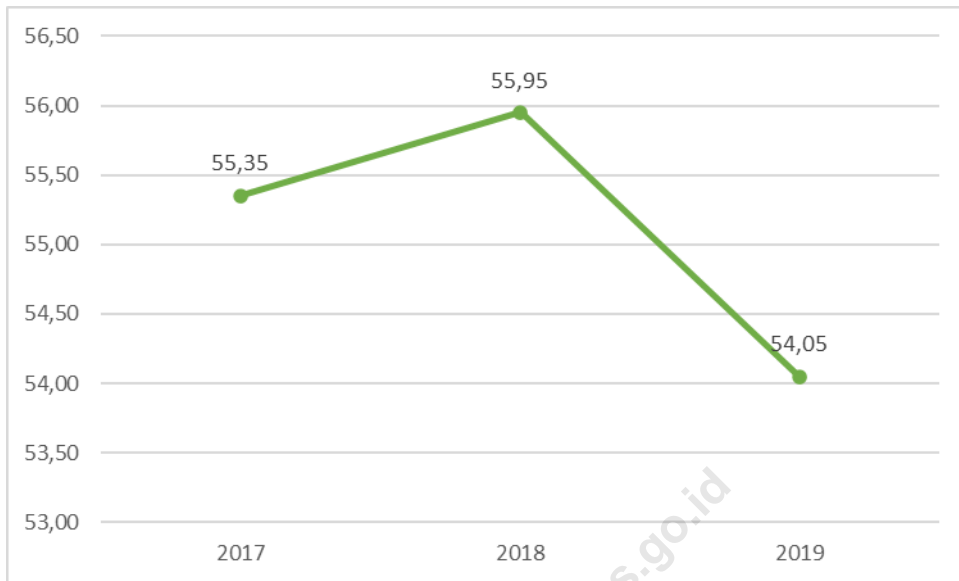
8. KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Angka kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemberdayaan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi sektor pertanian ke sektor nonpertanian; menumbuhkan swadaya penduduk miskin; serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan.

8.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto menunjukkan tren meningkat selama periode 2017-2019. Tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 55.350 jiwa atau sekitar 15,38 persen dari jumlah seluruh penduduk Jeneponto. Kemudian pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 55.950 jiwa atau sekitar 15,46 persen dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 54.050 jiwa atau sekitar 14,86 persen dari jumlah penduduk.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Gambar 8.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2019 (000 jiwa)

8.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2017-2019, tahun 2018 sebesar Rp 356.319,00 dan di tahun 2019 sebesar Rp 359.883,00.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P_1 mengalami penurunan, di mana nilai tahun 2018 sebesar 2,63 dan tahun 2019 menjadi 2,02. Nilai P_1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Diharapkan dengan nilai P_1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 mengalami penurunan selama periode 2017-2019, di mana nilai tahun 2017 sebesar 0,77

dan tahun 2019 menjadi 0,41. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 8.1. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2019

Keterangan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
GK	315.702	356.319	359.883
P₁	2,84	2,63	2,02
P₂	0,77	0,60	0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

9. SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam, dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet, semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

9.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak pada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya. Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian ke mana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Tabel 9.1. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Alat Komunikasi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Seluler	82,32	78,34	80,26
Komputer	9,52	10,99	10,28
Akses Internet	31,32	32,63	32,00

Sumber: Susenas

Pada tahun 2019, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mempunyai akses telepon seluler di Kabupaten Jeneponto mencapai 80,26 persen. Di mana persentase penduduk laki-laki yang mempunyai akses telepon seluler ada sebanyak 82,32 persen, sedangkan perempuan sebanyak 78,34 persen. Sementara itu, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mempunyai akses terhadap komputer cukup kecil, yaitu hanya 10,28 persen.

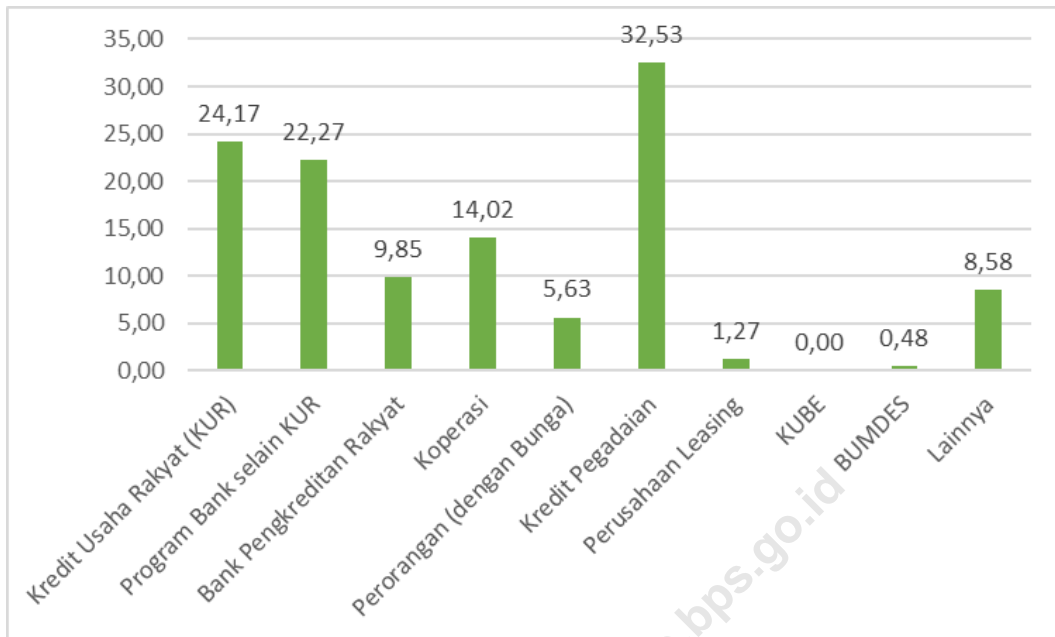
Aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi salah satunya adalah akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2019, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebesar 32,00 persen. perempuan lebih banyak yang memiliki akses internet dibandingkan penduduk laki-laki yaitu masing- masing sebesar 32,63 persen dan 31,32 persen.

9.2. Akses Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Beberapa contoh program pemberian kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Jenis program penyaluran yang lain seperti program bank selain KUR, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program koperasi, perorangan (dengan bunga), dan lainnya. Pada tahun 2019 rumah tangga paling banyak menerima kredit usaha pegadaian yaitu sebanyak 32,53 persen, disusul oleh KUR sebanyak 24,17 persen, program bank selain KUR sebanyak 22,27 persen, dan yang terkecil adalah KUBE sebanyak 0 persen.

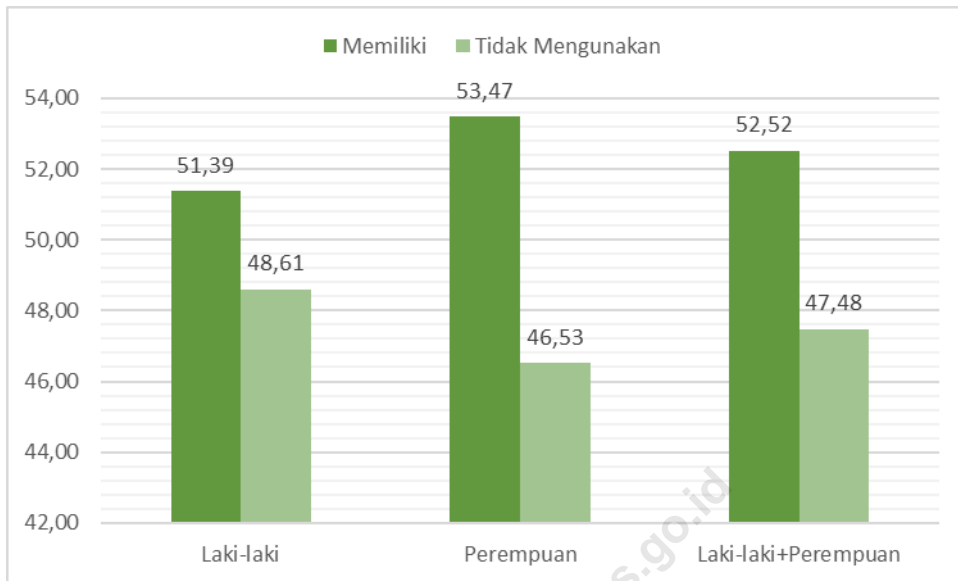
Salah satu usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan di antaranya adalah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat. Program pelayanan ini tentunya lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Adanya jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik dan merupakan implementasi pembangunan di bidang kesehatan seiring dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan.



Sumber: Susenas

Gambar 9.1. Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah maupun swasta di antaranya yaitu BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Askes/Asabri/Jamsostek, Jamkesmas/PBI, Jamkesda, Asuransi swasta, maupun jaminan kesehatan lain yang diberikan perusahaan/kantor. Semakin besarnya jumlah penerima jaminan pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.



Sumber: Susenas

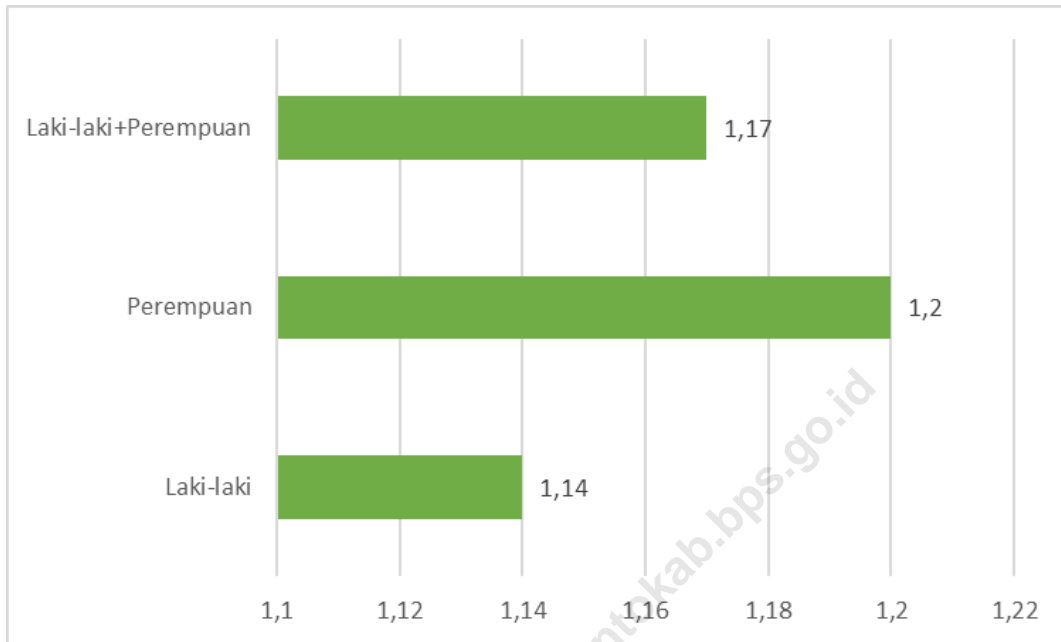
Gambar 9.2. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Berdasarkan hasil Susenas 2019, jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Jeneponto mencapai 52,52 persen, di mana jaminan pelayanan kesehatan terbanyak yang dimiliki masyarakat yaitu BPJS kesehatan PBI sebesar 40,23 persen. Penduduk perempuan lebih banyak memiliki jaminan kesehatan dibanding laki-laki yaitu masing-masing sebesar 53,47 persen dan 51,39 persen. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan ini masih perlu ditingkatkan lagi, terutama di perdesaan karena masih banyak masyarakat perdesaan yang belum mendapat jaminan pelayanan kesehatan.

9.3. Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2019 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali

kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.



Sumber: Susenas

Gambar 9.3. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Selama tahun 2019, penduduk yang menjadi korban kejahatan di Kabupaten Jeneponto mencapai 1,17 persen, di mana 1,14 persen korban adalah laki-laki dan 1,2 persen perempuan. Keamanan baik di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan harus ditingkatkan lagi guna memberi rasa aman bagi warga masyarakat sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



1. Jl. Pelita No. 58 Bontosunggu, 92311

Telp: (0419) 22256; Fax: (0419) 22256

Homepage: <http://jenepontokab.bps.go.id>

E-mail: bps7304@bps.go.id